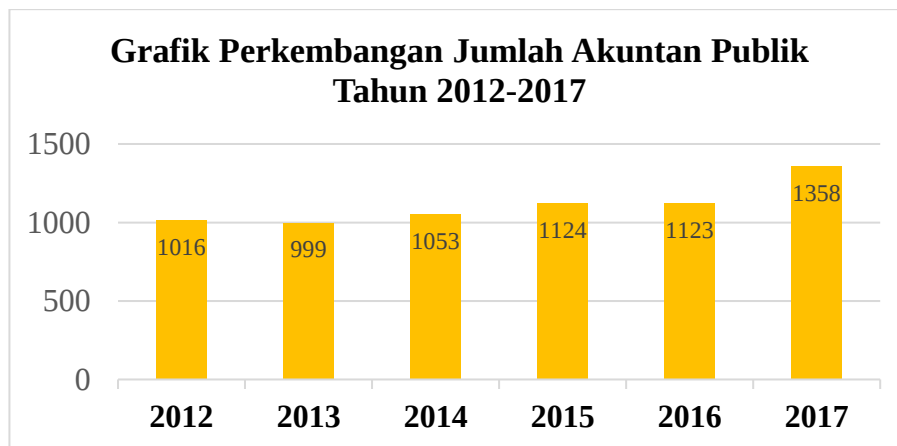


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Bab I pasal 1. Sedangkan Akuntan Publik menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 BAB I Pasal 1 adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik. Kuantitas atau jumlah akuntan publik di Indonesia hingga tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Perkembangan jumlah akuntan publik setiap tahunnya dapat dilihat dalam grafik berikut ini.



Gambar 1.1

Perkembangan Jumlah Akuntan Publik

Sumber: PPPK Kemekeu RI 2017

Untuk memenuhi kebutuhan para pengguna informasi laporan keuangan suatu perusahaan dalam penyajian informasi yang wajar maka dibutuhkan pihak yang dianggap independen yang memiliki kemampuan untuk mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan. Hal tersebut menjadi salah satu alasan peningkatan jumlah akuntan publik dan diikuti dengan peningkatan jumlah KAP di Indonesia. Salah satunya dapat dilihat dari jumlah KAP yang berada di kota Bandung.

Berdasarkan data keanggotaan IAPI, pada tahun 2015 sebanyak 28 KAP, pada tahun 2016 sebanyak 29 KAP, dan pada tahun 2017 jumlah KAP di kota Bandung sebanyak 30 KAP dan menjadi yang terbanyak ke 3 di Indonesia (iapi.or.id).

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat materialitas, peneliti mengambil objek penelitian yaitu Kantor Akuntan Publik Wilayah Bandung. Alasan peneliti mengambil penelitian di Bandung karena memiliki jumlah Kantor Akuntan Publik terbanyak ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Selain itu, terdapat beberapa Kantor Akuntan Publik di Bandung yang mendapat sanksi pembekuan izin akuntan publik dan di indikasikan masih terdapat salah saji pada laporan keuangan.

Jumlah Kantor Akuntan Publik (KAP) di Indonesia tahun 2017

No	Kota	Jumlah KAP
1	Jakarta	240
2	Surabaya	44
3	Bandung	30
4	Medan	22
5	Semarang	18
6	Bekasi	13
7	Malang	12
8	Tangerang Selatan	11
9	Yogyakarta	9
10	Tangerang	8

Sumber: (www.iapi.or.id)

1.2. Latar Belakang

Materialitas pada laporan keuangan adalah besarnya keseluruhan salah saji minimum dalam suatu laporan keuangan yang cukup penting sehingga membuat laporan keuangan menjadi tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (Febrianty, 2012). Di dalam menyusun

laporan keuangan dibutuhkan pihak ketiga yang bersifat independen dan obyektif untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yaitu jasa akuntan publik supaya laporan keuangan yang disajikan bebas dari salah saji serta disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam melaksanakan audit laporan keuangan auditor dihadapkan dengan banyak pertimbangan audit, salah satunya adalah pertimbangan tingkat materialitas. Pertimbangan tingkat materialitas merupakan hal yang sangat penting karena mempengaruhi pemberian opini seorang auditor terhadap laporan keuangan yang telah diaudit. Pertimbangan tingkat materialitas merupakan konsep relatif bukan absolut (Arens *et al*, 2014:320) sehingga penentuan tingkat materialitas berbeda-beda untuk tiap entitas/perusahaan tergantung pada ukuran masing-masing entitas/perusahaan.

Contoh kasus yang terkait dengan materialitas adalah kasus yang terjadi pada PT KAI tahun 2005, dimana terdapat beberapa salah saji material secara sengaja yang dihasilkan dari pelaporan audit yang dikeluarkan oleh akuntan publik. Pada kasus ini, akuntan publik diduga terlibat oleh pihak-pihak yang lain yang ingin mencari keuntungan. Dalam laporan keuangan PT KAI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.900.000.000,00 padahal pada kenyataannya PT KAI mengalami kerugian Rp. 6.300.000.000,00 sehingga kesalahan ini membuat pengaruh terhadap laporan keuangan yang dikeluarkan oleh akuntan publik. Seharusnya tugas seorang auditor adalah menilai besarnya kesalahan saji materialitas yang terkandung dalam laporan keuangan dan memberikan solusi bagi pemilik perusahaan dalam kasus ini auditor internal maupun eksternal tidak melakukan sesuatu yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang benar-benar mempunyai kualifikasi sebagai seorang auditor.

Tidak hanya PT KAI namun terdapat kasus UD. Raden Motor yang diindikasikan terjadinya masalah mengenai pertimbangan tingkat materialitas yaitu yang terjadi pada tahun 2010. Terjadi kredit macet sebesar Rp.52.000.000.000 diduga akibat kesalahan pihak bank dalam melakukan prosedur dalam pemberian kredit terhadap pihak UD. Raden Motor. Kesalahan tersebut terjadi karena dalam laporan keuangan UD. Raden Motor ternyata terdapat empat kegiatan data yang tidak dibuat/diaudit oleh akuntan publik (Biasa Sitepu) sehingga terjadilah

kesalahan dalam proses kredit. Kejadian ini diduga karena akuntan publik tidak memperhatikan materialitas suatu data keuangan secara kualitatif, karena dengan tidak adanya ke-empat data keuangan tersebut menyebabkan pihak Bank BRI menjadi menyetujui pengajuan kredit dari UD. Raden Motor yang ternyata tidak mampu untuk menyelesaikan kreditnya (hukum.kompasiana.com, 2013).

Dalam mempertimbangkan tingkat materialitas dibutuhkan seorang auditor yang memiliki sikap profesionalisme yang tinggi sehingga dapat menentukan seberapa besar jumlah materialitas yang akan ditetapkan. Profesionalisme merupakan sikap dan perilaku seorang auditor dalam menjalankan profesinya dengan kesungguhan dan tanggung jawab, agar mencapai kinerja tugas sebagaimana yang diatur dalam organisasi profesi.

Contoh kasus yang ditemui dalam hal krisis profesionalisme adalah kasus yang menimpa salah satu akuntan publik (auditor eksternal) yaitu Drs. Hans Burhanuddin Makarao, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1124/KM.1/2009 tanggal 9 September 2009, Drs. Hans Burhanuddin Makarao, telah dikenakan sanksi pembekuan selama 3 (tiga) bulan. Hal ini disebabkan karena yang bersangkutan belum sepenuhnya mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT. Samcon pada tahun buku 2008, yang dinilai berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap (LAI) Laporan Auditor Independen (infobanknews.com/2009/09/menkeu-bekukan-izin-8-akuntan-publik-dan-kantor-akuntan-publik).

Auditor yang memiliki profesionalisme yang tinggi akan memberikan kontribusi yang dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan, (Kurniawanda, 2013). Pada penelitian Ekawati (2013), Ayu Lestari dan Karya Utama (2013), Kurniawanda (2013), Evi Junianti dan Alit Triani (2013), Minanda dan Muid (2013), Sarwini, Sinarwati dan Yuniarta (2014), Febrianty (2012), Erfan (2013), menyatakan bahwa profesionalisme auditor berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Namun pada penelitian Utami dan Adhi Nugroho (2014) profesionalisme berpengaruh negatif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Di dalam menjalankan profesinya, auditor juga diharapkan untuk memegang teguh etika profesi yang sudah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Etika Profesi adalah karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan profesi lainnya, yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para anggotanya (Erfan, 2013). Dengan adanya kode etik, masyarakat akan dapat menilai sejauh mana seorang auditor telah bekerja sesuai dengan standar etika. Dalam hal etika, sebuah profesi harus memiliki komitmen moral yang tinggi yang dituangkan dalam bentuk aturan khusus, dimana aturan tersebut digunakan sebagai alat untuk menjaga sikap auditor kepada sesama profesi untuk bersaing secara sehat dan menghasilkan kinerja yang handal. Dari hasil penelitian Kurniawanda (2013), Evi Junianti dan Alit Triani (2013), Minanda dan Muid (2013), Sarwini, Sinarwati dan Yuniarta (2014), menyatakan bahwa variabel etika profesi auditor berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Namun menurut Ayu lestari dan Karya Utama (2013), Utami dan Adhi Nugroho (2014) menyatakan bahwa variabel etika profesi auditor tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Faktor lain yang berkaitan dengan penentuan tingkat materialitas adalah pengalaman auditor. Pengalaman akuntan publik dapat diperoleh dari banyaknya tugas yang telah dilakukan. Pengalaman auditor merupakan salah satu elemen penting dalam melaksanakan tugas audit, sehingga cara memandang dan menanggapi informasi serta mengambil keputusan yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan antar auditor berpengalaman dengan auditor yang kurang berpengalaman akan berbeda. Menurut penelitian Ekawati (2013), Evi Juniati dan Alit Triani (2013), Minanda dan Muid (2013), Sarwin, Sinarwati dan Yuniarta (2014), menyatakan bahwa variabel pengalaman auditor berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas, namun berbeda dengan penelitian Ayu Lestari dan Karya Utama (2013), Galeh Utami dan Adhi Nugroho (2014), menyatakan bahwa variabel pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Penelitian tentang tingkat materialitas banyak dilakukan tetapi masih terdapat inkonsistensi dari penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga masih

relevan untuk diteliti kembali dengan objek yang berbeda yaitu KAP di Bandung. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin meneliti kembali **“Pengaruh Profesionalisme Auditor, Etika Profesi dan Pengalaman Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas”**.

1.3. Rumusan Masalah

Tingkat materialitas suatu laporan keuangan yang dapat mempengaruhi informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan. Hal tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang akan di ambil oleh para pengguna laporan keuangan salah satunya adalah investor dan calon investor. Maka, dibutuhkan pihak ketiga yang bersifat independen dan objektif untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen, yaitu jasa akuntan publik. Dengan profesionalisme, etika profesi, dan pengalaman yang dimiliki auditor seharusnya auditor akan semakin baik dalam menentukan tingkat materialitas. Namun, seorang auditor juga dapat melakukan kecurangan seperti kasus yang terjadi pada KAP Cooper & Lybrand dimana KAP Cooper & Librand tersebut mau ikut serta untuk menduduki jabatan penting di perusahaan Phar Mor demi mendapatkan imbalan untuk membuat laporan-laporan keuangan ganda. Dalam kasus ini auditor tersebut telah melanggar kode etik dan profesionalisme auditor karena auditor terlibat secara langsung dalam menutupi *fraud* tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi bahwa semakin tinggi profesionalisme seorang auditor diindikasikan akan semakin mudah dalam melakukan kecurangan. Dengan adanya etika profesi tidak menjamin auditor semakin baik dalam menentukan tingkat materialitas karena etika profesi lebih kearah perilaku seorang auditor tersebut dalam menjalankan tugasnya, bukan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki auditor, tidak menutup kemungkinan melakukan kecurangan.

1.4. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana profesionalisme auditor, etika profesi auditor, pengalaman auditor dan pertimbangan tingkat materialitas KAP di kota Bandung?
- 2) Apakah profesionalisme auditor, etika profesi auditor dan pengalaman auditor berpengaruh secara simultan terhadap pertimbangan tingkat materialitas KAP di kota Bandung?
- 3) Bagaimana pengaruh secara parsial :
 - a) Pengaruh secara parsial profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas?
 - b) Pengaruh secara parsial etika profesi auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas?
 - c) Pengaruh secara parsial pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas?

1.5. Tujuan Penelitian

Karena adanya masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah memberikan bukti empiris :

- 1) Untuk mengetahui profesionalisme auditor, etika profesi auditor dan pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas menurut persepsi auditor di kota Bandung.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan profesionalisme auditor, etika profesi auditor dan pengalaman auditor terhadap tingkat materialitas menurut persepsi auditor di kota Bandung.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh secara parsial :
 - a) Pengaruh secara parsial dalam hal profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas menurut persepsi auditor di kota Bandung.
 - b) Pengaruh secara parsial dalam hal etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas menurut persepsi auditor di kota Bandung.

- c) Pengaruh secara parsial dalam hal pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas menurut persepsi auditor di kota Bandung.

1.6. Manfaat Penelitian

Penulis berharap semoga penelitian ini memberikan manfaat antara lain :

1) Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah menjadi tambahan referensi atau rujukan mengenai Pengaruh Profesionalisme Auditor, Etika Profesi, dan Pengalaman Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas.

2) Manfaat Praktik

Manfaat Praktik dari penelitian ini adalah sebagai masukan bagi KAP dan pihak-pihak lain yang berkepentingan agar dapat mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan peningkatan Profesionalisme Auditor, Etika Profesi dan Pengalaman Auditor yang mempengaruhi Pertimbangan Tingkat Materialitas Auditor.

1.7. Ruang Lingkup Penelitian

1) Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas (variabel independen) dan satu variabel terikat (variabel terikat). Profesionalisme Auditor, Etika Profesi dan Pengalaman Auditor merupakan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel dependennya yaitu tingkat materialitas.

2) Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah kabupaten dan kota Provinsi Jawa Barat. Objek penelitian yang digunakan adalah tingkat materialitas di pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Data penelitian ini diperoleh dari hasil kuisioner auditor yang ada di KAP kota Bandung.

1.8. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berhubungan antara bab satu dengan yang lainnya dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Sistematika penulisan secara garis besar adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini terdiri dari latar gambaran umum objek penelitian, yaitu gambaran tentang tempat penelitian yang digunakan. Kemudian latar belakang penelitian yang berisi tentang fenomena atau gejala dari peristiwa yang akan diteliti. Selanjutnya perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini berisi tinjauan pustaka penelitian yang membahas teori-teori terkait penelitian dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik, masalah, atau variabel penelitian, difokuskan pada teori-teori yang sudah baku dan teruji secara ilmiah. Kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pemikiran yang akan digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian sehingga terbentuk kerangka pemikiran yang akan mengantarkan pada kesimpulan penelitian. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang jawabannya masih harus diuji secara empiris serta ruang lingkup penelitian yang menjelaskan secara rinci batasan dan cakupan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat menjawab dan menjelaskan masalah penelitian, meliputi uraian tentang jenis penelitian, variabel operasional,

tahapan penelitian, populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian, jenis data, serta teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasannya harus diuraikan secara kronologis dan sistimatis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian. Sistimatika pembahasan ini akan lebih tampak jelas luas cakupan, batasan, dan benang merahnya apabila disajikan dalam sub judul tersendiri. Setiap aspek pembahasan hendaknya dimulai dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya diikuti oleh penarikan kesimpulan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini berisi ulasan pembahasan penelitian sesuai dengan hasil analisa bab IV, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan serta bahan masukan bagi penelitian selanjutnya di masa mendatang.